BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan inovasi dan kreativitas. Pemerintah, melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, menegaskan bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat meningkatkan daya saing produk di pasar global. Dalam era digital, industri tidak hanya bergantung pada harga dan kualitas produk, tetapi juga harus mengedepankan inovasi sebagai keunggulan kompetitif (Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, 2019). Oleh karena itu, transformasi ekonomi yang berbasis sumber daya alam menuju sumber daya manusia yang kreatif menjadi suatu kebutuhan mendesak.

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi kreatif, yang didukung oleh keberagaman budaya serta kemajuan teknologi digital yang turut mendorong pertumbuhan kewirausahaan (Siagian et al., 2025). Menyadari hal tersebut, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis untuk menciptakan ekosistem yang mendukung sektor ini, termasuk peningkatan infrastruktur, literasi digital, serta akses permodalan bagi pelaku usaha kreatif (Fitrya Maimuna et al., 2024). Dalam mendukung ekosistem tersebut, kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan komunitas kreatif juga diperlukan untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan keberlanjutan usaha.

Selain itu, penguatan sektor ekonomi kreatif juga memerlukan regulasi yang mampu melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Banyak pelaku usaha kreatif

menghadapi tantangan dalam melindungi karya mereka dari plagiarisme dan eksploitasi tanpa izin (Saefudin et al., 2025). Oleh sebab itu, kebijakan yang mempermudah pendaftaran HKI harus diperkuat guna memberikan perlindungan hukum bagi industri kreatif. Disamping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, serta kewirausahaan sangat diperlukan agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

Meskipun ekonomi kreatif memiliki potensi besar sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Ketidaksetaraan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, strategi yang terukur dan menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat dari sektor ekonomi kreatif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. Dengan pendekatan yang komprehensif, ekonomi kreatif diharapkan mampu menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan berbasis inovasi.

Dalam perekonomian Indonesia, ketidaksetaraan menjadi salah satu persoalan krusial yang mempengaruhi dinamika pembangunan nasional. Ketidaksetaraan tersebut menjadi isu utama yang tidak dapat diabaikan (Yolanda, 2024). Sehingga adanya fenomena ini mencerminkan ketimpangan distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya. Dampak yang dihasilkan juga terlihat signifikan di dalam pembangunan ekonomi, hal ini dikarenakan ketidaksetaraan cenderung menghambat laju pertumbuhan yang berkelanjutan. Sehingga penanganan dari

adanya ketidaksetaraan ini memerlukan kebijakan yang terukur dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan pembangunan agar lebih merata dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Sumber: (Trading Economics, 2025)

Dalam hal ini terlihat pada kuartal ketiga tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,95%. Meskipun angka ini menunjukkan pertumbuhan, namun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian tersebut sedikit lebih rendah dari perkiraan pasar yakni sebesar 5,0% dan juga dibawah kuartal sebelumnya yang dapat mencapai 5,05%. Hal ini menandai pertumbuhan PDB pada periode tersebut merupakan yang terlemah di tahun 2023, terutama karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang cenderung stagnan. Namun demikian, dengan pencapaian pertumbuhan sebesar 5,03% dalam tiga kuartal pertama 2024, prospek ekonomi Indonesia untuk mencapai target

pertumbuhan tahunan sebesar 5,2% masih terbuka, meskipun dibutuhkan akselerasi pada kuartal keempat (Trading Economics, 2025).

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata, peran pemerintah menjadi sangat penting, khususnya dalam mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan infrastruktur yang mendukung serta pembukaan akses pasar pagi para pelaku usaha (Windasari et al., 2023). Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keterlibatan aktif masyarakat menjadi aspek fundamental. Pemberdayaan berbasis partisipasi memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menggerakkan roda ekonomi di wilayahnya masing-masing (Sukomardojo et al., 2023). Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci penting, yang dapat diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan informasi yang relevan agar masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk mengembangkan usaha secara mandiri. Meskipun demikian, implementasi dari strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya akses informasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonominya secara optimal.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, komitmen pemerintah Indonesia tercermin dalam adopsi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2020 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS (Yolanda, 2024). Dokumen tersebut menegaskan pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mencapai tujuan SDGs. Dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, ditekankan pula bahwa penguatan sektor UMKM merupakan strategi utama untuk meningkatkan inklusi ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan agenda global dalam mendorong keberlanjutan ekonomi dan sosial.

Penegasan tersebut memperlihatkan konsistensi pemerintah dalam menjadikan UMKM sebagai penggerak utama dalam pembangunan berkelanjutan. Fokus diarahkan pada penciptaan nilai tambah, perluasan akses pasar, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengurangan ketimpangan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, mendistribusikan hasil pembangunan, dan kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Ilham Darfaz et al., 2023). Landasan hukum untuk penguatan sektor ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pemberlakuan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menggaris bawahi pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Tak hanya dari segi jumlah yang besar, UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional serta sebagai pencipta utama lapangan kerja di berbagai sektor.

Namun demikian, menjadi ujung tombak perekonomian tentunya bukan hal mudah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang menghambat pertumbuhan dan pengembangannya. Salah satu faktor yang memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian adalah kondisi demografi

Indonesia, yang saat ini tengah menikmati bonus demografi, dengan proporsi penduduk muda mencapai lebih dari 25% dari total populasi (Al Farisi & Iqbal Fasa, 2022).

Permasalahan pertama adalah lemahnya struktur permodalan serta keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai. Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal kerja untuk mengembangkan usahanya (Deanova et al., 2023). Disisi lain, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur dan persyaratan dalam mengakses sumber pendanaan, ditambah dengan minimnya informasi mengenai pasar dan faktor produksi yang mempersempit peluang pengembangan usaha (Dzikrullah & Chasanah, 2024).

Permasalahan yang kedua yang cukup signifikan adalah keterbatasan dalam jaringan usaha dan sistem informasi pemasaran. Hal ini dikarenakan, banyak dari UMKM yang masih kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap mengenai pasar faktor produksi. Dimana informasi ini sangat penting yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal manajemen pemasaran dan penguasaan teknologi juga menjadi kendala utama bagi UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas (Shobaruddin, 2020). Sehingga dalam hal ini, UMKM sering menghadapi persaingan yang ketat dengan produk impor yang memiliki kualitas dan harga yang lebih kompetitif.

Permasalahan yang ketiga adalah kelemahan dalam akses mengenai teknologi, dimana banyak dari pelaku UMKM yang masih gagap teknologi dan belum mampu memanfaatkan platform digital dalam memasarkan produknya. Hal ini juga

disebabkan masih tidak meratanya infrastruktur teknologi yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia sehingga membuat banyak UMKM kesulitan mengakses teknologi yang diperlukan (Octaviani et al., 2025). Permasalahan ini juga disebabkan karena lemahnya dukungan pemerintah, meskipun ada beberapa program pemerintah yang mendukung mengenai digitalisasi UMKM, namun implementasinya masih belum merata dan belum mencapai seluruh pelaku UMKM.

Dalam konteks regional, tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya berskala nasional, tetapi juga mencerminkan kondisi spesifik di tingkat provinsi, termasuk di Jawa Timur. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang signifikan, Jawa Timur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, analisis mengenai kondisi UMKM serta kontribusinya terhadap perekonomian regional menjadi aspek esensial, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana digitalisasi dan akses terhadap teknologi telah dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, serta hambatan yang masih dihadapi dalam proses adaptasi terhadap ekosistem ekonomi digital.

Jawa Timur merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia, dengan sektor UMKM sebagai salah satu kontributor utama. Berdasarkan data tahun 2021, sektor UMKM menyumbang sekitar 56,9% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, menunjukkan perannya yang krusial dalam perekonomian daerah. Selain itu, pada triwulan II tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 7,05%, di mana konsumsi rumah tangga menjadi faktor dominan dengan kontribusi sebesar 59,78%. Data ini

mengindikasikan bahwa UMKM tidak hanya berperan dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah.

Kota Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Hal ini tercermin dari keberadaan sentra produksi alas kaki, seperti Pusat Grosir Sepatu (PGS), serta berbagai produk lokal yang mengusung kekayaan budaya dan kearifan lokal, seperti batik dan kriya yang terinspirasi dari warisan budaya Majapahit. Pada tahun 2024 didukung dengan pertumbuhan ekonomi kota sebesar 5,32% dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 8,61 triliun (BPS Kota Mojokerto, 2025). Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kontribusi lebih dari 19.000 UMKM, yang sebagian besarnya bergerak di sektor kreatif, juga dengan komitmen Pemerintah Kota Mojokerto melalui pelaksanaan program inkubasi lima subsektor ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh oleh Kemenparekraf sebagai bentuk strategi penguatan daya saing dan memperluas akses pasar produk lokal baik tingkat nasional maupun internasional (Tempo, 2025).

Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan Kota Mojokerto sebagai lokasi pelaksanaan program inkubasi lima subsektor ekonomi kreatif berdasarkan pertimbangan atas potensi strategis yang dimiliki kota ini dalam mendukung pengembangan industri kreatif di tingkat lokal (Riani, 2024b). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah dan mempersiapkan produk-produk lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Direktur Kuliner, Kriya, Desain,

dan Fashion Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Repulik Indonesia (Kemenparekraf), pemilihan Kota Mojokerto dilakukan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisatanya yang menjanjikan (Andri Santoso, 2024).

Pemilihan kelima subsektor tersebut merupakan strategi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara komprehensif dan terarah. Program ini melibatkan kolaborasi antara Kemenparekraf, Pemerintah Kota Mojokerto, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang secara bersama-sama mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. *Showcase* hasil inkubasi yang diselenggarakan di Halaman Pendopo Sabha Kridatama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto, menampilkan berbagai karya unggulan dari peserta, termasuk desain arsitektur PGS Mojokerto, fesyen bermotif batik lokal, serta kriya yang mencerminkan kekhasan budaya daerah. Produk-produk yang ditampilkan menunjukkan integrasi antara kreativitas modern dan nilai-nilai tradisional sebagai strategi penguatan identitas dan daya saing produk lokal.

Penunjukan Kota Mojokerto sebagai lokasi program inkubasi lima subsektor juga didasarkan pada kebutuhan untuk memperluas pasar UMKM lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku kreatif menjadi langkah nyata dalam membawa produk lokal ke panggung nasional. Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto, Ani Wijaya, menekankan pentingnya strategi *branding* yang lebih komersial agar produk UMKM lebih adaptif terhadap tren pasar, termasuk pada sektor alas kaki yang kini

tengah di-*upgrade* desainnya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas (Riani, 2024a).

Lebih dari itu, program inkubasi wirausaha desain kriya yang menjadi fokus penelitian ini sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional, dalam rangka menyonsong Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6–7 persen serta optimalisasi pada tahun 2030. Dalam kerangka tersebut, sektor ekonomi kreatif dipandang strategis karena mampu menjadi lokomotif pertumbuhan inklusif, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan inovasi produk. Pemerintah pusat telah menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis kreativitas lokal, terutama melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks ini, Kota Mojokerto tampil sebagai salah satu daerah yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap strategi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan penghargaan “Tokoh Penguat Ekonomi Berbasis UMKM” yang diterima oleh Walikota Ika Puspitasari dari Beritajatim.com pada tahun 2025, sebagai pengakuan atas keberhasilannya dalam memperkuat sistem ekosistem UMKM secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut juga tercermin dari serangkaian inovasi layanan publik, pelatihan berbasis keterampilan kriya, serta fasilitas pemasaran digital yang secara langsung mendukung pelaku UMKM lokal. Dengan demikian, prestasi Kota Mojokerto tidak hanya menunjukkan keselarasan dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mengafirmasi pentingnya program inkubasi sebagai strategi pemberdayaan yang relevan dan berdaya transformasi tinggi (Prihatini, 2025).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Diskopukmperindag Kota Mojokerto, pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Mojokerto tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dinamika ekonomi global, percepatan digitalisasi, serta dampak pasca pandemi COVID-19 menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah ini. Banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan *omzet*, kesulitan mengakses pasar digital, dan keterbatasan dalam menyesuaikan produk dengan perubahan preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan ekonomi internasional seperti peningkatan tarif impor di negara tujuan ekspor turut memengaruhi daya saing produk lokal.

Dalam konteks tersebut, program inkubasi lima subsektor ekonomi kreatif yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf di Kota Mojokerto menjadi intervensi yang relevan dan strategis. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem UMKM lokal agar lebih tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan dukungan multi-pihak dan penguatan kapasitas melalui pendekatan inkubasi, Kota Mojokerto diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi kreatif yang sukses, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Sektor ekonomi kreatif di Mojokerto, khususnya subsektor desain kriya, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan pelestarian budaya. Di Kota Mojokerto, desain kriya berkembang pesat seiring dengan banyaknya pelaku UMKM yang menghasilkan produk kerajinan tangan, seperti alas kaki, batik, dan aneka kriya berbahan dasar lokal. Keunikan desain kriya Mojokerto terletak pada kemampuannya memadukan

inovasi modern dengan unsur kearifan lokal, sehingga tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah.

Program inkubasi desain kriya yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi salah satu upaya strategis untuk memberdayakan UMKM lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses pasar. Pelaksana dari program ini telah berhasil menyeleksi dan membina peserta dari berbagai sub-sektor desain. Dari 107 peserta awal yang berhasil dari desain fashion, desain komunikasi visual, dan arsitektur, tercatat sebanyak 71 peserta berhasil lolos seleksi inkubasi, terdiri atas 6 peserta dari desain fashion, 8 peserta dari desain produk/alas kaki, 15 peserta dari desain kriya, 16 dari DKV, dan 26 dari arsitektur dan desain interior. Meskipun jumlah peserta dari desain kriya tidak menjadi yang terbanyak secara kuantitatif, keberadaan 15 peserta yang lolos menunjukkan bahwa kriya tetap menjadi sektor yang diperhitungkan dalam peta pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Melalui program ini, pelaku usaha kriya di Mojokerto didorong untuk meningkatkan kualitas desain, inovasi produk, serta strategi pemasaran agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 1.1 Jumlah Peserta Program Inkubasi 2024

No.	**Sub-sektor desain**	**Jumlah peserta awal**	**Jumlah lolos inkubasi**
1.	Desain Fashion	12	6
2.	Desain Komunikasi Visual	45	16
3.	Arsitektur dan Desain Interior	50	26
4.	Desain Kriya	15	15
5.	Desain Produk / Alas Kaki	8	8
Jumlah		107	71

Sumber: Diskopukmperindag, 2025

Fakta bahwa subsektor desain kriya termasuk dalam lima besar subbidang yang lolos inkubasi nasional, meskipun secara kuantitatif tidak menempati posisi teratas, pemilihan subsektor kriya sebagai fokus penelitian didasari oleh pertimbangan bahwa subsektor kriya memiliki karakteristik yang mampu mengekspresikan identitas budaya, memiliki nilai tambah desain, dan potensi ekspor yang tinggi. Dalam idealnya, kebijakan inkubasi kreatif termasuk di Kota Mojokerto diarahkan agar subsektor yang paling menjanjikan mendapatkan perhatian, sumber daya, pelatihan desain, dan akses pasar digital secara memadai. Namun kenyataannya, meskipun program Inkubasi 5 subsektor di Mojokerto mencakup kriya, bersama dengan subsektor lain, data empiris menunjukkan bahwa dukungan khusus terhadap kriya masih relatif lebih lemah dibanding subsektor desain interior atau desain komunikasi visual, terutama dalam hal akses pelatihan desain, pemahaman pola konsumsi modern, dan teknologi produksi. Program inkubasi kriya sering kali hanya muncul dalam agenda pameran atau *showcase*, tapi implementasi pendampingan teknis dan akses pasar yang berkelanjutan belum konsisten.

Seharusnya, adanya perbandingan antara Kota Mojokerto dan daerah-daerah lain yang berhasil dalam subsektor kriya menunjukkan bahwa Mojokerto dapat belajar dari model-model di daerah yang sudah lebih maju, sehingga kebijakan kriya di Mojokerto bisa disempurnakan. Misalnya di Kalimantan Selatan, Disdag mencatat nilai ekspor kriya mencapai US$ 679 juta pada 2024, hal ini menunjukkan bahwa dengan strategi desain dan inovasi, subsektor kriya mampu tembus pasar global (Hanafi, 2025). Sedangkan di Mojokerto, meskipun ada prestasi seperti menjadi “role model inovasi ekonomi kreatif” dan pelaksanaan

showcase Inkubasi 5 subsektor, publikasi lokal belum menunjukkan data kuantitatif eksplisit tentang kontribusi nilai ekspor kriya dari Mojokerto, atau akses pasar digital yang kuat bagi para perajin kriya (Riani, 2024). Kesenjangan ini memperkuat alasan ilmiah bahwa subsektor kriya di Mojokerto perlu diteliti secara mendalam apakah memenuhi kondisi ideal atau perkembangan yang diharapkan.

Seharusnya, pasar kriya nasional dan lokal terus menunjukkan tren pertumbuhan dengan data kuantitatif yang kuat, yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian, misalnya nilai ekspor subsektor kriya, proporsi subsektor kirya dalam total ekonomi kreatif, pertumbuhan permintaan pasar domestik dan internasional. Dari data terkini, subsektor kriya bersama fesyen dan kuliner merupakan penyumbang ekspor ekonomi kreatif signifikan. Pada semester I 2024, subsektor kriya berkontribusi US$ 4,75 miliar dari total ekspor ekonomi kreatif Indonesia yang mencapai US$ 12,36 miliar (Zhafira, 2025). Di sisi lokal, Mojokerto memiliki potensi besar seperti motif budaya Majapahit, karya alas kaki lolak “Giardo” yang sudah diperbaiki desainnya agar sesuai tren modern, dan komitmen pemerintah kota dalam inkubasi dan *showcase* produk kriya (Riani, 2024). Namun belum ada data yang memadai mengenai pertumbuhan omzet, jumlah pelaku kriya yang menggunakan teknologi digital, atau presentase produk kriya Mojokerto yang memasuki pasar ekspor/digital. Ketiadaan data ini menunjukkan bahwa subsektor kriya di Mojokerto belum sepenuhnya memenuhi kondisi ideal pasar.

Di tingkat lokal, Kota Mojokerto turut menunjukkan geliat pertumbuhan sektor UMKM, terutama pada bidang *fashion* berbasis desain kriya. Potensi ini tidak lepas dari karakteristik masyarakatnya yang memiliki keterampilan kriya secara turun-temurun serta dukungan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan

usaha kreatif melalui pelatihan, fasilitasi pasar, dan inkubasi bisnis. Meskipun demikian, pelaku UMKM di Kota Mojokerto masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses pasar nasional, kurangnya pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya strategi pengembangan produk yang berbasis desain inovatif. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan pemberdayaan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing UMKM lokal, khususnya pada sub-sektor kriya *fashion* yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi (BSKDN Kemendagri, 2025).

Desain kriya merupakan salah satu subsektor industri kreatif yang memadukan aspek budaya lokal dengan nilai tambah modernisasi produk. Pemberdayaan masyarakat melalui desain kriya tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas produk lokal, namun juga mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha melalui peningkatan pendapatan dan akses pasar. Inovasi dalam desain kerajinan diperlukan untuk menjawab tantangan globalisasi, di mana produk kreatif semakin diminati di pasar internasional.

Program inkubasi wirausaha sub desain kriya di Kota Mojokerto merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif yang diselenggarakan secara kolaboratif antara pemerintah Kota Mojokerto dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM serta pelaku usaha kreatif lokal agar mampu berkompetisi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Pelaksanaan dimulai dengan tahap seleksi dan rekrutmen pelaku UMKM loka yang potensial di sektor kriya. Seleksi ini dilakukan melalui *open call,* survei pemetaan, dan kurasi untuk memastikan peserta memiliki potensi yang sesuai.

Setelah proses seleksi, peserta mengikuti pelatihan intensif yang berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Oktober tahun 2024 dengan pelatihan dilakukan secara luring dan daring yang bertempat di Sentra IKM Kota Mojokerto. Pelatihan ini meliputi pengembangan desain, produksi, dan pemasaran produk, termasuk pemanfaatan platform digital seperti *e-commerce* dan media sosial guna memperluas akses pasar. Metode pembelajaran yang diterapkan mengedepankan studi kasus dan pendekatan aktif, serta dikombinasikan dengan pendampingan intensif secara daring menggunakan *Whatsapp* untuk pembinaan lanjutan dan pemantauan. Pendampingan ini berfokus pada penguatan aspek produksi agar produk memenuhi standar kualitas tinggi, sekaligus membekali pelaku kreatif dengan kemampuan inovasi dan strategi pemasaran digital.

Program inkubasi ini juga mencakup penyusunan *roadmap* bisnis yang meliputi aspek legalitas dan pendanaan, sehingga para pelaku usaha memiliki bekal komprehensif dalam mengelola bisnisnya. Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk memoles produk agar sesuai dengan tren pasar, meningkatkan inovasi dan kualitas desain, mendorong akses pasar digital, serta memberdayakan sumber daya manusia dan sinergi antara pelaku kreatif dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya mendukung peningkatan kualitas produk tetapi juga memperkuat kapasitas bisnis pelaku UMKM kreatif secara nyata dan berkelanjutan.

Di era digital, akses ke pasar global semakin terbuka melalui *platform e-commerce*, sehingga UMKM kerajinan di Kota Mojokerto memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pasar. Inkubasi wirausaha juga membantu para pelaku UMKM mengidentifikasi tren pasar yang sesuai, baik dari sisi desain

maupun preferensi konsumen, sehingga produk kerajinan mereka lebih berdaya saing di pasaran. Hal ini menjadi langkah strategis dari program inkubasi kewirausahaan dimana mampu mendukung aspirasi masyarakat untuk membangun sebuah usaha. Program ini memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para wirausaha, serta membantu mereka dalam mengakses modal dan memperluas jaringan pemasaran. Dengan menerapkan program inkubasi desain kriya, diharapkan peserta dapat mengembangkan keterampilan desain, manajemen usaha, dan strategi pemasaran yang efektif. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, tetapi juga untuk menciptakan usaha yang mampu bertahan dalam pasar yang kompetitif.

Kota Mojokerto saat ini tengah berfokus pada kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara inklusif. Pembangunan yang inklusif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok ekonomi rentan seperti UMKM. Dalam konteks ini, program inkubasi wirausaha dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberdayakan UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

Dengan dukungan kebijakan dari pemerintah dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, program inkubasi wirausaha diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Mojokerto. Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang relevan adalah pengembangan pusat-pusat inkubasi bisnis yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal dan tren pasar

global. Dengan dukungan program inkubasi yang tepat, UMKM sektor *fashion* diharapkan dapat tumbuh menjadi industri kreatif yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah.

Pemberdayaan yang dilakukan melalui program inkubasi ini tidak hanya dimaknai sebagai proses teknis pelatihan semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun kapasitas masyarakat secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, analisis pemberdayaan didasarkan pada kerangka teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wilson (1996), yang meliputi empat tahapan utama yaitu *awakening* (penyadaran), *understanding* (pemahaman), *harnessing* (pemanfaatan), dan *using* (penggunaan). Teori ini menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses bertahap yang dimulai dari kesadaran individu atau kelompok terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi, dilanjutkan dengan pemahaman atas strategi dan sumber daya yang tersedia, pemanfaatan peluang dan modal yang dimiliki, hingga kemampuan untuk secara mandiri menggunakan hasil pemberdayaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha. Pendekatan ini dapat membantu dalam memahami bagaimana program inkubasi wirausaha desain kriya mendorong transformasi pelaku UMKM, baik secara individu maupun kolektif, menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks program inkubasi desain kriya, teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Wilson (1996) menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menelaah bagaimana peserta mengalami proses pembelajaran, penguatan kapasitas, serta membangun kepercayaan diri dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Proses pemberdayaan ini berlangsung secara individual maupun kolektif, dengan melibatkan sinergi antara pemerintah

(Diskopukmperindag), pelaku usaha, dan ekosistem kreatif lokal. Tentunya dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan yang berakar pada kondisi masyarakat dan keterbatasan sumber daya di lapangan. Salah satu kendala utama yang memengaruhi pelaku UMKM ini adalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang membatasi ruang gerak pengembangan usaha.

Selain itu, terbatasnya modal dan fluktuasi harga bahan baku menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan produksi. Persaingan pasar yang ketat dan kurangnya pemahaman bisnis, khususnya pemanfaatan teknologi digital, juga menjadi hambatan signifikan dalam mendorong daya saing produk kriya lokal. Permasalahan ini mencakup aspek kualitas sumber daya manusia dan mentalitas pengrajin, serta lemah jaringan usaha yang menghambat penetrasi pasar secara optimal. Selain itu, ketidakkonsistenan pelaku dalam memenuhi target tugas program, yang terkadang mengutamakan pesanan produk dibanding penyelesaian pelatihan, memperlihatkan tantangan manajerial dalam mengikuti proses inkubasi.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, indikator *awakening* menurut Wilson (1996) menekankan pentingnya kesadaran kritis pelaku usaha terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan inovasi sebagai syarat keberlanjutan. Secara ideal, pelaku UMKM kriya di Kota Mojokerto seharusnya memiliki kesadaran tinggi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, memahami urgensi inovasi produk, serta menunjukkan proaktivitas dalam dinamika pasar. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar pelaku masih menunjukkan resistensi terhadap metode baru, enggan melakukan transformasi berbasis digital, dan terkendala keterbatasan modal yang memperlemah kepedulian terhadap pengembangan usaha. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan mendasar pada

tahap kesadaran, di mana inkubasi wirausaha seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menstimulasi lahirnya kesadaran inovatif, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif.

Selanjutnya, indikator *understanding* menekankan kapasitas intelektual dan teknis dalam mengelola usaha secara berdaya saing. Dalam kerangka ideal, pelaku UMKM kriya seharusnya mampu menguasai keterampilan desain, manajemen produksi, pemasaran digital, serta strategi penetrasi pasar, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai estetik tetapi juga kompetitif di ranah nasional maupun internasional. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi oleh Diskopukperindag Kota Mojokerto kondisi aktual menunjukkan lemahnya penguasaan aspek teknis tersebut. Pelaku kriya masih memiliki keterampilan yang terbatas, kurang memahami strategi pemasaran berbasis digital, serta minim akses pada pengetahuan pasar. Ketidakmampuan ini membatasi mereka dalam meningkatkan kualitas produk dan memperluas pangsa pasar, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi ideal dengan kondisi kapasitas riil yang dimiliki.

Lebih jauh, indikator *harnessing* menekankan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang telah diperoleh dari praktik nyata. Pada kondisi yang ideal, para pelaku UMKM kriya Kota Mojokerto seharusnya mampu mengimplementasikan ilmu dari pelatihan, mengoptimalkan platform digital seperti *marketplace* dan media sosial, serta membangun jejaring bisnis yang mendukung ekspansi pasar. Namun kondisi faktual menunjukkan bahwa pemanfaatan tersebut kerap terhambat oleh keterbatasan modal kerja, lemahnya akses terhadap bahan baku berkualitas, serta minimnya kolaborasi antar

pelaku usaha. Banyak dari mereka yang belum mampu mengintegrasikan hasil pembelajaran ke dalam strategi operasional yang konsisten, hal ini menandakan perlu adanya model pendampingan yang lebih aplikatif dan berkesinambungan.

Terakhir pada indikator *using* berfokus pada konsistensi penerapan inovasi dan berkelanjutan usaha. Secara normatif, pelaku UMKM kriya seharusnya mampu menjaga standar kualitas produk, secara adaptif menyesuaikan diri dengan tren pasar, serta memastikan kesinambungan pengelolaan usaha dalam jangka panjang. Namun kenyataannya, sebagian besar pelaku hanya mampu menerapkan hasil pelatihan dalam jangka pendek, dengan kesulitan mempertahankan kualitas. Ketidakkonsistenan ini diperburuk oleh minimnya monitoring pasca-program inkubasi, sehingga inovasi yang pernah diterapkan kerap terhenti setelah program selesai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pada tahap penggunaan belum menginternalisasi praktik keberlanjutan, sehingga diperlukan intervensi yang lebih intensif melalui program inkubasi wirausaha kriya yang mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas dan realitas, serta memperkuat daya saing UMKM kriya di tingkat nasional maupun internasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengulas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Akmal Yuna Ulayya mengenai pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berbagai program strategis dan inovatif. Program-program seperti klinik usaha mikro, kelas bisnis, pendampingan usaha, serta pemanfaatan fasilitas Malang *Creative Center* (MCC) menjadi contoh konkret intervensi kebijakan yang

mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku usaha. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah hambatan dalam proses pemberdayaan, antara lain rendahnya motivasi belajar pelaku usaha, keterbatasan kuota dan anggaran, serta kendala fasilitas dan pengelolaan tempat. Meskipun demikian, evaluasi berkala dan adaptasi kebijakan menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut (Ulayya, 2024).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Maulidia Eka Pratiwi dan Khairul Rahman mengenai pemberdayaan masyarakat oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kota Pekanbaru, khususnya pada studi kasus UMKM *Home Industry* Bolu Kemojo di Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mikro. Melalui berbagai upaya seperti pelatihan, bantuan permodalan, penyediaan fasilitas, serta kolaborasi dengan pihak eksternal, program pemberdayaan ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat tumbuh secara mandiri dan berdaya saing. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau seluruh pelaku UMKM, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, terbatasnya akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial pelaku usaha, serta minimnya keterlibatan mitra usaha dalam proses pemberdayaan secara langsung (Pratiwi & Rahman, 2024).

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Muhammad Punggawa Kandis mengenai Program Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kepada UMKM Di Kota Palembang memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah berupaya meningkatkan kapasitas pelaku

UMKM melalui pelatihan, pendampingan, akses terhadap teknologi, serta penguatan strategi pemasaran. Fokus utama dari kajian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan yang diterapkan dan dampaknya terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kualitas produk, serta kemampuan bersaing para pelaku UMKM di pasar lokal maupun nasional. Dalam penerapannya, program pemberdayaan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman pengelolaan usaha, hambatan perizinan, minimnya pemanfaatan teknologi dan media digital, kendala permodalan, serta dampak signifikan dari pandemi COVID-19 yang menurunkan kinerja sebagian besar pelaku UMKM (Kandis, 2024).

Penelitian serupa dilakukan oleh Nurhaeni Jaya, Cahyo Sasmito, Roro Merry C. Wulandari mengenai implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Batu memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Studi ini mengevaluasi keberhasilan program dari berbagai aspek, termasuk komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. (Jaya et al., 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM. Meski seluruh penelitian tersebut menyoroti aspek pemberdayaan UMKM secara umum, masih sedikit studi yang menyoroti secara spesifik tentang efektivitas program inkubasi kewirausahaan berbasis desain kriya, terutama dalam konteks Kota Mojokerto yang memiliki potensi lokal dan warisan budaya yang kuat.

Padahal, dalam realitanya pengembangan sektor kriya memiliki karakteristik dan kebutuhan pemberdayaan yang berbeda dibandingkan subsektor lain karena keterkaitannya dengan nilai-nilai budaya, estetika produk, dan keterampilan berbasis tradisi.

Dalam konteks inilah strategi pemberdayaan masyarakat melalui program inkubasi kewirausahaan kriya di Kota Mojokerto menjadi sangat layak dilakukan. Dampak yang diharapkan dari program ini antara lain adalah meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah di daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, diharapkan program ini akan memberikan pengaruh yang positif dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang mengkaji secara mendalam pelaksanaan program inkubasi desain kriya di Mojokerto khususnya dalam aspek inovasi desain, kolaborasi, dan dampaknya terhadap peningkatan nilai tambah produk. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dalam pengembangan desain kriya sangat dibutuhkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif daerah. Seharusnya subsektor kriya di Mojokerto menjadi pilihan penelitian yang menarik dibanding subsektor lain karena mampu menunjukkan gap yang lebih besar, potensi budaya yang kuat, dan peluang ilmiah untuk meneliti pemberdayaan dalam konteks desain kriya. Realitasnya, meskipun ada prestasi simbolik, subsektor seperti kuliner dan fesyen masih mendapatkan perhatian dan sumber daya lebih besar baik di opini publik, pelatihan desain, akses modal, dan jaringan pasar. Oleh karena itu,

penelitian tentang UMKM kriya di Mojokerto memberi peluang akademis dan praktis untuk mengeksplorasi bagaimana empat indikator pemberdayaan dapat bekerja secara optimal di subsektor yang selama ini kurang “tumpuan” dibanding subsektor lain, membuka kontribusi baru dalam literatur dan kebijakan guna memastikan bahwa kriya tidak hanya menjadi hiasan kreatif, melainkan sektor ekonomi yang tangguh.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program inkubasi wirausaha desain kriya sebagai upaya pengembangan UMKM *fashion* di Kota Mojokerto?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat melalui program inkubasi wirausaha desain kriya sebagai upaya pengembangan UMKM *fashion* di Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, penulis memiliki pandangan tentang manfaat apa saja yang diperoleh dari penulisan penelitian ini. Manfaat ini selanjutnya diharapkan akan bermanfaat bagi peneliti, pembaca, dan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inkubasi Wirausaha Desain Kriya Sebagai Upaya Pengembangan UMKM *Fashion* Di Kota Mojokerto,
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber penelitian di masa yang akan datang,
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari selama berada di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji pengetahuan dan teori yang telah didapat selama dibangku perkuliahan serta menjadi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi akademik di bidang inkubasi dan pemberdayaan UMKM, yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Diskopukmperindag Kota Mojokerto

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi berbasis data terhadap efektivitas program inkubasi yang telah dijalankan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan dan implementasi program di masa depan.